



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jambukarang No. 8 Telp. (0281) 891450 Facs., (0281) 895194

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 050/2377 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja SKPD Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga tentang Rencana Kerja SKPD Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga
6. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Dengan Surat Keputusan ini ditetapkan Renja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.
- (2) Uraian mengenai Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 3

Renja Bappelitbangda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan berpedoman pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan :

- a. RKA Bappelitbangda;
- b. DPA Bappelitbangda ;
- c. Alat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja SKPD.

Pasal 5

Kepala Bappelitbangda bertanggung jawab dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dengan kewajiban melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan Kegiatan pada masing-masing bidang.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal : ~~23~~ Juli 2020

 **KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURBALINGGA,**

SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720527 199803 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappelitbangda merupakan implementasi Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja SKPD yang penyusunannya mengacu dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada, Bappelitbanda Kabupaten Purbaingga sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dituntut untuk mempunyai rencana kerja OPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Panjang Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja OPD adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2021 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Rancangan awal RKPD
- E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Tujuan Renja SKPD
- B. Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kinerja Sasaran

Hingga akhir tahun 2019, Bappelitbangda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Tujuan : Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, dalam mencapai tujuan tersebut pada tahun 2019 nilai AKIP komponen perencanaan sebesar 20,02 dengan target kinerja 22 sehingga capaian kinerja sebesar 91%. Penilaian ini naik dari penilaian tahun 2018 sebesar 0,87, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 1,14 dan dari tahun 2016 naik sebesar 2,18. Selengkapnya dibawah ini perbandingan komponen perencanaan AKIP sebagai tujuan kinerja Bappelitbangda tahun 2016 dan 2019 sebagaimana pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perbandingan komponen Perencanaan AKIP
Tahun 2016 s.d 2019
Kabupaten Purbalingga

Komponen yang dinilai	Bobot	2016	2017	2018	2019			Capaian Renstra s/d 2019
					Target	Realisasi	Capaian	
Perencanaan Kinerja	30	17,84	18,88	19,15	22	20,02	91%	97,22
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC		B		

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran yang harus dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya kualitas kelitbang. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1. nilai rata-rata capaian kinerja program pembangunan Kabupaten Purbalingga, 2. tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD dan 3. Persentase rekomendasi hasil inovasi yang diterapkan di daerah. Adapun penjelasan terkait capaian sasaran kinerja Bappelitbangda tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan

kualitas perencanaan yang baik menggambarkan tiga hal yakni dokumen perencanaan, kualitas pengendalian dan evaluasi serta kemampuan mengorganisir sumberdaya. Kedua indikator sasaran meningkatnya kualitas perencanaan tergambar pada 1. ketepatan dalam penetapan indikator kinerja, pemberian target dan ketercapaiannya seluruh target yang telah ditetapkan, 2. Tingkat keselarasan program RKPD terhadap Program dalam dokumen RPJMD yang menggambarkan kinerja Bappelitbangda dalam mengkoordinasikan program-program yang digunakan dalam RKPD. Adapun rumus dari indikator rata-rata capaian kinerja program dan tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD adalah

a. Rata-rata capaian kinerja program

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran urusan perencanaan dari tahun 2016-2019 dan Capaian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga s/d tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan Perencanaan
BAPPELITBANGDA
Tahun 2016 – 2019

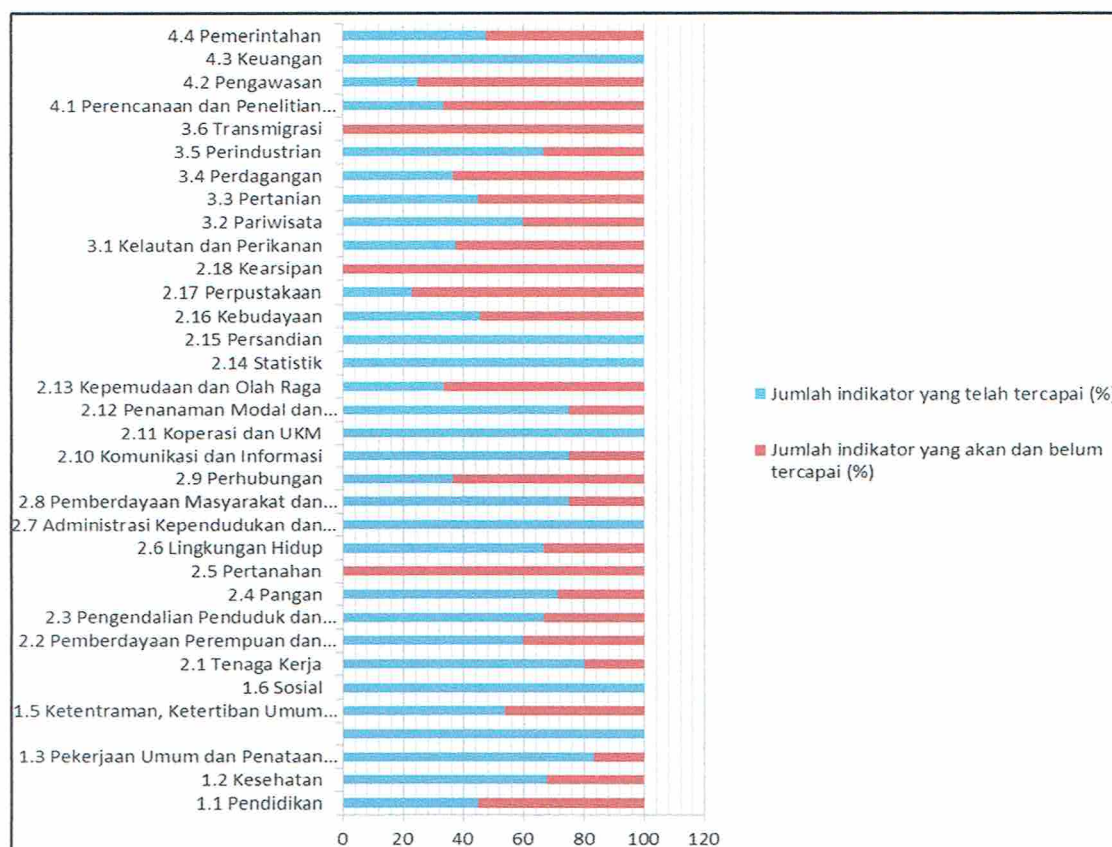
NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2016			2017			2018			2019			Capaian Renstra s/d 2019
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan													
	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	95,5	92,46	96,82	96	102,44	106,71	97	99,87	102,4	97,5	85	87,17	74,88
	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	100	83,3	83,3	100	93,9	93,9	100	90	90	100	98	98	76,38

Sumber : Buku Evaluasi RKPD, Bappelitbangda Purbalingga

Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 yang pertama yaitu indicator rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah sebesar 85 menunjukkan kinerja yang baik. Melihat perbandingan realisasi kinerja sasaran pada tahun 2016 sebesar 92,46 persen, tahun 2017 sebesar 102,44 persen dan tahun 2018 sebesar 99,87 persen. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tahun 2019 mengalami penurunan, dibandingkan tahun 2016 menurun 7,46, dibandingkan tahun 2017 menurun 17,44, sedangkan dibandingkan tahun 2018 menurun 14,87.

Secara lebih mendalam rata-rata capaian target kinerja program pembangunan daerah tahun 2019 dari 392 indikator, 222 indikator atau 56,63 persen indikator telah menunjukkan indicator kinerja telah tercapai dan terdapat 170 indikator atau 43,37 persen yang kinerjanya perlu perhatian/upaya keras yang tersebar dalam 30 urusan. Secara ringkas gambaran status penilaian capaian indikator kinerja masing-masing urusan tergambar pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Capaian Indikator Kinerja masing-masing Bidang Urusan Tahun 2019
Kabupaten Purbalingga



S
i Kinerja RKPD Tahun 2019, Bappelitbangda Purbalingga

b. Tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD

Indikator sasaran kedua urusan perencanaan berupa tingkat keselarasan dokumen RKPD terhadap RPJMD. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD terealisasi 98%, dari target kinerja sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 98%. Indikator kinerja tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dapat dilihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan (tahun 2019) yang pada khususnya proses penyusunan dokumen RKPD Tahun 2020 dengan melihat hasil fasilitasi Provinsi terkait konsistensi target program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dengan RPJMD periode 2016-2021 yang harus dilaksanakan pada Tahun 2020. program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun 2020 sejumlah 98 dan program RKPD sejumlah 96 sehingga terdapat 2 program RPJMD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2020. Kedua

program RPJMD tersebut adalah Program Pengelolaan Pertamanan dan Kawasan Perkotaan dan Program Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja. Fasilitasi provinsi merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam penetapan dokumen RKPD. Rekapitulasi konsistensi jumlah dan nomenklatur program RKPD 2020 dan RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

KONSISTENSI JUMLAH DAN NOMENKLATUR PROGRAM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 2020 DAN RPJMD TAHUN 2016-2021

Kabupaten : Purbalingga

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	JUMLAH PROGRAM RPJMD	JUMLAH PROGRAM RKPD	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG KONSISTEN	JUMLAH NAMA PROGRAM /OUTCOME YANG INKONSISTEN	PENJELASAN INKONSISTENSI
1	2	3	4	5	6	7	8
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	6	6	6 / 29	0 / 0	Konsisten
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	11	11	11 / 68	0 / 0	Konsisten
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPU - PR	6	5	6 / 12	0 / 0	Konsisten
4	Sosial	DINSOSDALDUK KB P3A	3	3	3 / 6	0 / 0	Konsisten
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINRUMKIM	2	2	2 / 3	0 / 0	Konsisten
6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	KESBANGPOL, SETDA, SATPOL PP, BPBD	7	7	7 / 13	0 / 0	Konsisten
II	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						Konsisten
7	Tenaga Kerja	DINNAKER	2	2	2 / 5	0 / 0	Konsisten
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINSOSDALDUK KB P3A	1	1	1 / 5	0 / 0	Konsisten

9	Pangan	DKPP	2	2	2 / 10	0 / 0	Konsisten
10	Pertanahan	DINRUMKIM	1	1	1 / 3	0 / 0	Konsisten
11	Lingkungan Hidup	DLH	4	4	4 / 16	0 / 0	Konsisten
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DINDUKCAPIL	1	1	1 / 2	0 / 0	Konsisten
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DINPERMASDES	2	2	2 / 12	0 / 0	Konsisten
14	Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSDALDUKKB P3A	4	3	4 / 18	0 / 0	Konsisten
15	Perhubungan	DINHUB	2	2	2 / 9	0 / 0	Konsisten
16	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	2	2	2 / 12	0 / 0	Konsisten
17	Koperasi dan UKM	DINKOP UKM	3	3	3 / 6	0 / 0	Konsisten
18	Penanaman Modal	DPMPT SP	2	2	2 / 8	0 / 0	Konsisten
19	Kepemudaan dan Olahraga	DINPORAPAR	2	2	2 / 6	0 / 0	Konsisten
20	Statistik	KOMINFO	1	1	1 / 1	0 / 0	Konsisten
21	Persandian	KOMINFO	1	1	1 / 1	0 / 0	Konsisten
22	Kebudayaan	DINDIKBUD	2	2	2 / 11	0 / 0	Konsisten
23	Perpustakaan	DINARSPUS	1	1	1 / 26	0 / 0	Konsisten
24	Kearsipan	DINARSPUS	1	1	1 / 3	0 / 0	Konsisten
III	URUSAN PILIHAN						Konsisten
25	Kelautan dan Perikanan	DKPP	3	3	3 / 6	0 / 0	Konsisten

26	Pariwisata	DINPORAPAR	3	3	3 / 5	0 / 0	Konsisten
27	Pertanian	DINAS PERTANIAN	6	6	6 / 51	0 / 0	Konsisten
28	Perdagangan	DINPERINDAG	4	4	4 / 11	0 / 0	Konsisten
29	Perindustrian	DINPERINDAG	1	1	1 / 3	0 / 0	Konsisten
30	Transmigrasi	DINNAKER	1	1	1 / 1	0 / 0	Konsisten
IV	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH						Konsisten
31	Perencanaan	BAPELITBANGDA	2	2	2 / 4	0 / 0	Konsisten
32	Penelitian dan Pengembangan	BAPELITBANGDA	1	1	1 / 2	0 / 0	Konsisten
33	Pengawasan	INSPEKTORAT	1	1	1 / 4	0 / 0	Konsisten
34	Keuangan	BAKEUDA	2	2	2 / 6	0 / 0	Konsisten
35	Kepegawaian, dan Pelatihan	BKPPD	1	1	1 / 4	0 / 0	Konsisten
36	Adm. Pemerintahan	SET DPRD, SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN	4	4	4 / 16	0 / 0	Konsisten
JUMLAH			98	96	98 / 398	0 / 0	

Hambatan/Kendala dalam pencapaian target kinerja adalah :

1. Kendala teknis koordinasi dan sinkronisasi OPD dalam penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Ketersediaan data statistic untuk tujuan perencanaan yang masih terbatas dan perlu perhatian/upaya keras dalam pencapaian target kinerja OPD;
3. Pejabat/pengampu OPD pada Bappelitbangda tidak sepenuhnya menguasai kinerja OPD yang diampunya.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang telah dilakukan antara lain :

- a. Mendampingi OPD dalam penyusunan cascading sebagai acuan perjanjian kinerja OPD.
 - b. Mengupdate dan memfasilitasi penyediaan data perencanaan dengan memberikan anggaran program/kegiatan untuk seluruh OPD dalam mencapai indicator kinerja OPD.
 - c. Melaksanakan pendampingan dan monev pelaksanaan program/kegiatan pada OPD yang diampu.
- 2) Meningkatnya kualitas kelitbangan

sasaran kedua yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah meningkatnya kualitas kelitbangan. Peningkatan kualitas litbang ditandai dengan Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pada tahun 2018 Kabupaten Purbalingga tidak masuk dalam nominator krenova provinsi Jawa Tengah sehingga tidak memiliki 1 rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan kedalam kebijakan daerah. Anggaran tahun 2019 program/kegiatan penelitian dan pengembangan daerah telah digunakan. Perbandingan pencapaian kinerja sasaran urusan kelitbangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Pencapaian Kinerja Sasaran Urusan LITBANG
BAPPELITBANGDA
Tahun 2017 s/d 2019

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019		
		TAR GET	REA LISA SI	CAPA IAN	TAR GET	REA LISA SI	CAPA IAN	TA RG ET	REA LIS ASI	CAPA IAN
2	Meningkatnya kualitas kelitbangan									
	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	50	50	100	50	50	100	55	0	0

Melihat tabel diatas pencapaian indicator urusan kelitbangan sangat membutuhkan perhatian/upaya keras agar target sasaran dapat tercapai. Untuk mencapai indicator urusan kelitbangan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penelitian dan pengembangan iptek daerah pada tahun 2019 yaitu :

1. Pendampingan metodologi penelitian ditingkat SMA/SMK se-Kabupaten Purbalingga dan workshop kelitbangan dengan tema Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Purbalingga guna menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
2. Mengikuti pameran promosi inovasi di Kabupaten Wonosobo tanggal 20-22 September 2019 dan Menyaksikan pemberian penghargaan terhadap krenova kabupaten/kota yang menjadi nominator provinsi jawa tengah tahun 2019.
3. Menyelenggarakan lomba krenova dalam rangka menciptakan inovasi daerah kabupaten purbalingga tingkat SMA/SMK dan masyarakat umum se-Kabupaten Purbalingga tanggal 9-10 oktober 2019. Lomba Krenova diikuti oleh 20 peserta tingkat SMA/SMK dan Masyarakat. Dari 20 peserta tersebut diambil pemenang 3 pemenang untuk kategori SMA/SMK dan 3 kategori masyarakat. Dengan banyak pertimbangan dan pencermatan hasil paparan inovasi dihasil pemenang dengan judul inovasi sebagai berikut :
 - a. Kategori Pelajar
 - Juara I dengan Judul inovasi “Monitoring and Control Traffic System (Sistem Monitoring dan Kontrol Lampu Lalu Lintas) hasil karya Singgih Ardiansyah, Arisca Abdullah, Iqbal Dwi Tayudin dari SMK N 1 Purbalingga
 - Juara II dengan Judul inovasi “Modifikasi Sepeda Motor Berbahan Bakar Bensin menjadi Sepeda Motor Listrik sebagai sarana Transportasi Ramah Lingkungan hasil karya Abu Latif Saputra, Fiki Nur Afrian, Anwal Setiadin, Sutardi, S.Pd dari SMK N 1 Rembang
 - Juara III dengan Judul inovasi “Penerapan Sistem GPS guna meminimalisir Produk Sampah di Lingkungan Sekolah hasil karya Meta Dewi Istiani, Salsa Ruqiyatun, Syifa Sugiyati dari SMA N 1 Kejobong
 - b. Kategori Umum
 - Juara I dengan Judul inovasi “Cilok Setan (Ciplukan Lokal untuk Handsanitizer Terjangkau) Handsanitizer Ekstra Daun Ciplukan (Physalis Angulata L) sebagai Antiseptik Berbahan Lokal hasil karya Istingantun

Khoeriyah, S.Si, Dwi Fairus Zulaikaha, S.Pd dari Desa Kalikajar RT 04 RW 01 Kecamatan Karanganyar

Juara II dengan Judul inovasi “Garnified Massiv Open Online Cours Platform (Platform Pembelajaran Daring Terbuka Berbasis Garnifikasi) hasil karya Rujianto Saputro, M.Kom, Rinta Setyo Nugroho, Soleh Nur Hayat dari Desa Selanegara RT 01 RW 03 Kecamatan Kaligondang

Juara III dengan Judul inovasi “E-Rapot Kurtilas” hasil karya Eka Setya Budi Nugroho dari Desa Nangkasawit RT 07 RW 04 Kecamatan Kejobong.

Para pemenang krenova se-Kabupaten Purbalingga diusulkan untuk mengikuti Lomba Krenova tingkat Kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Tengah.

Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran pada tahun 2019 adalah

1. Belum adanya jaringan kelitbangan, Dewan Riset Daerah (DRD) atau pendampingan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2. Belum memiliki fungsional peneliti yang bertugas melakukan pengkajian kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.

Adapun langkah – langkah strategis dalam rangka meningkatkan capaian kinerja antara lain

1. Diharapkan untuk tahun yang akan datang sudah ada pendampingan dari perguruan tinggi dan Dewan Riset Daerah dan juga diharapkan sudah mempunyai jaringan-jaringan yang terkait dengan Kelitbangan agar dapat mengembangkan pembangunan yang ada di Kab. Purbalingga.
2. Mengusulkan formasi untuk fungsional peneliti sesuai dengan analisis jabatan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

2.1.1. Kinerja Program Dan Kegiatan

1. Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan

a. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut terdapat 1 (satu) sasaran kinerja yang akan dicapai yakni (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan.

Tabel 4.2
Capaian Sasaran Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	97,5 persen	85 persen	%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran dari program ini adalah Kualitas Dokumen Perencanaan Kabupaten. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu melaksanakan indikator kinerja program dengan menilai tingkat aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan, terjadinya keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu serta Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 4.3
Capaian Kinerja
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2019

No	Indikator Program	Target 2019	realisasi	Capaian
1	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	76 %	75 %	78,68 %
2	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 %	98 %	98 %
3	Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	100 %	100 %	100 %
4	Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	100 %	75 %	75 %

1) Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD

Indikator Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen RKPD menggambarkan peran serta masyarakat dalam pembangunan (pendekatan partisipatif) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan dari empat pendekatan perencanaan yakni pendekatan partisipatif, politik, teknokratik dan bottom up – top down. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang terakomodir semakin menunjukkan perencanaan yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Target dari indikator kinerja ini pada akhir

RENSTRA OPD adalah sebesar 78 persen, sedangkan target pada tahun 2019 adalah sebesar 76 persen dan terealisasi sebesar 75 persen.

2) Tingkat keselarasan Sasaran RKPD terhadap Sasaran RPJMD

Tingkat keselarasan sasaran RKPD terhadap Sasaran RPJMD dihitung dari kesesuaian indikator sasaran dan target RKPD terhadap indikator sasaran dan target RPJMD. Dari 36 sasaran di RKPD terdapat 36 sasaran yang sama di RPJMD. Adapun indikator kinerja di RKPD sebanyak 66 buah, lebih banyak 1 indikator daripada indikator kinerja di RPJMD yang sebanyak 65 buah. Selanjutnya, target indikator kinerja pada RKPD yang dipasang berbeda dengan RPJMD terdapat 16 buah, dengan 6 target kinerja dibawah target RPJMD dan 10 buah target kinerja di atas RPJMD.

3) Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu

Pada program perencanaan pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Ketepatan waktu menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja dokumen setelahnya yakni penyusunan renja OPD, penyusunan KUA-PPAS dan Penyusunan APBD. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD paling lambat ditetapkan pada bulan Juni tahun n-1. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPD ditetapkan tepat bulan juni dinilai 100; RKPD ditetapkan pada bulan Juli dinilai 75; RKPD ditetapkan pada bulan Agustus dinilai 50; RKPD ditetapkan pada bulan September dinilai 25; RKPD tidak disusun 0). Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini. Pada tahun 2019 Bappelitbangda telah menyusun RKPD dan legalitasnya dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2018. Melihat dari tanggal ditetapkannya maka nilai

4) Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur

Pada program perencanaan pembangunan daerah selain bertujuan menjaga kualitas dokumen perencanaan juga ditujukan dalam rangka menjamin ketepatan waktu dan ketepatan prosedur. Di atas telah dilaporkan capaian kinerja indikator dokumen perencanaan disusun tepat waktu, sedangkan indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur dapat dijelaskan bahwa keberhasilan indikator ketepatan prosedur ini akan menjamin akuntabilitas

kinerja perencanaan. Seluruh langkah dan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan dapat diuji dan ditelusuri kembali prosesnya. Prosedur yang menjadi pedoman adalah Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen RKPD minimal melalui 4 (empat) tahap yakni Konsultasi Publik, Musrenbangcam, Forum OPD, Musrenbangkab. Untuk memudahkan penghitungan capaian indikator Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur maka pernyataan kualitatif tersebut dijadikan nilai kuantitatif dengan asumsi sebagai berikut RKPD disusun melewati 4 tahapan dinilai 100; RKPD disusun melewati 3 tahapan dinilai 75; RKPD disusun melewati 2 tahapan dinilai 50; RKPD disusun melewati 1 tahapan dinilai 25; RKPD tidak disusun 0). Tahun 2019 Bappelitbangda telah menyusun RKPD sesuai dengan prosedur yang berlaku walaupun tidak melalui tahapan Forum konsultasi publik tersendiri. Sesuai Pasal 179 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Forum Konsultasi Publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan. Berdasarkan hal tersebut, dalam proses penyusunan RKPD, Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sekaligus pada tahapan-tahapan Musrenbang.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 13 kegiatan meliputi:

1) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun Ekonomi

a. Maksud dan Tujuan :

- 1) Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang mencakup 10 urusan, 2 tujuan RPJMD, 10 sasaran RPJMD, 19 indikator sasaran RPJMD, dan 27 program dalam RPJMD;
- 2) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Tahun 2019 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang ekonomi dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- 4) Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;

5) Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang ekonomi yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.

c. Sasaran :

Program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang ekonomi diantaranya sektor pertanian dalam arti luas, perikanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), dan penanaman modal

d. Output / Keluaran :

Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Ekonomi Tahun 2019 yang berisi gambaran hasil fasilitasi, diskusi dan desk pada saat penyusunan dokumen perencanaan (Renstra hasil cascading dan Renja OPD) pada rumpun bidang ekonomi serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Renja OPD rumpun Ekonomi	dokumen	7	7	100%
2	Kesuaian Lapangan atas Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Ekonomi	kali-dokumen	28	28	100%

e. Permasalahan yang dihadapi :

Diantaranya adalah dikarenakan luasnya lingkup kegiatan pembangunan di bidang ekonomi (10 urusan di 7 OPD, 32 Program, 161 kegiatan) yang akan di monev serta keterbatasan waktu dan personel yang ada, sehingga tidak semuanya program dan kegiatan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi

f. Upaya Pemecahan Masalah :

Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar lintas OPD, rapat-rapat teknis serta desk untuk menggali informasi dengan semua personel di OPD dalam rumpun bidang ekonomi serta menyusun schedule yang bisa terintegrasi dengan kegiatan yang ada di OPD rumpun bidang ekonomi agar dapat mengefektifkan kegiatan dan personel serta mengefesiensikan dari sisi waktu pelaksanaan

g. Target dan Realisasi Keuangan :

Target anggaran : Rp. 157.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 70.332.912,- atau sebesar 44,63%

2) Penyusunan Buku Vision Purbalingga

a. Maksud dan Tujuan :

Untuk menginformasikan Gambaran capaian dan arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga sebagai wujud keberhasilan pemerintah.

b. Sasaran :

-

c. Output / Keluaran :

Output dari kegiatan ini berupa buku vision yang berisi tentang Gambaran capaian dan arah kebijakan daerah.

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target anggaran : Rp. 97.640.000,-

2) Realisasi Keuangan : Rp. 81.830.000,- atau 83,81 %.

3) Penyelenggaraan Musrenbangwil

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud penyelenggaraan musrenbang adalah terlaksananya koordinasi tingkat Eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap) dalam rangka pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b. Sasaran :

Kabupaten se Eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap).

c. Output / Keluaran :

Usulan Kegiatan dari masing-masing kabupaten dalam lingkup Eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap) untuk dibiayai oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

d. Permasalahan yang Dihadapi :

Adanya rangkaian kegiatan Romuna (Perkemahan Pramuka Pelajar) dari Kwarda Pramuka Tingkat Provinsi Jawa Tengah di 4 Kabupaten se Eks Karesidenan Banyumas (Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Cilacap).

e. Upaya Pemecahan Masalah

Rapat Koordinasi dari masing-masing Pemangku Kepentingan untuk pengaturan jadwal kegiatan.

f. Target dan Realisasi Keuangan

Anggaran yang tersedia sebesar Rp 258.480.000,- dengan realisasinya Rp 251.427.000,- atau 97,27 persen.

4) FGD Tematik Kebijakan Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

Mendapatkan input dan masukan dari stakeholders terkait dalam rangka membuat kebijakan pembangunan daerah.

b. Sasaran :

Stakeholder terkait.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi kebijakan pengembangan potensi/penyelesaian permasalahan	rekomendasi	4	4	100 persen

Indikator Kinerja tersebut tercapai 4 kali yang terdiri dari FGD Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sebanyak 2 kali, FGD Penanggulangan Kemiskinan (SEPAKAT), dan FGD Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp. 274.713.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. Rp. 205.951.344,- atau 74,97 %

5) Penyusunan RKPD

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud Penyusunan RKPD adalah :

- 1) Menentukan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah untuk satu tahun ;
- 2) Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh OPD dalam menyusun Renja OPD;
- 2) Menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan APBD;
- 3) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

b. Sasaran :

Aparatur pemerintah daerah/ OPD

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rancangan Awal RKPD	buku	80	80	100 %
2	Rancangan RKPD	buku	350	350	100 %
3	Rancangan Akhir RKPD	buku	125	125	100 %
4	Perbup tentang RKPD	buku	80	80	100 %

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

i. Target Anggaran : Rp. 199.520.000,-

ii. Realisasi Anggaran : Rp. 195.704.157,- atau 98,09 %

6) Penyelenggaraan Musrenbang

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud penyelenggaraan musrenbang adalah tersusunnya RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif.

Adapun tujuannya adalah

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan.
2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan;
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

b. Sasaran :

Masyarakat Kabupaten Purbalingga.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Konsultasi Publik Ranwal RKPD	forum	1	0	0
2	Musrenbangcam	forum	5	5	100 %
3	Forum OPD	forum	4	4	100 %
4	Musrenbangkab	forum	1	1	100 %

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp 244.250.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp 204.627.329,- atau 83,78 %

7) Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi

a. Maksud dan Tujuan :

pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi yaitu berfungsinya sistem terintegrasi melalui aplikasi Simral, dimana data perencanaan pembangunan baik dari tingkat desa, kecamatan, forum OPD, tingkat kabupaten sampai dengan pasca Musrenbang dapat diinput dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga nantinya dapat dilanjutkan ke dalam sistem informasi keuangannya. Sistem aplikasi perencanaan terintegrasi tersebut berupa aplikasi Simral yang dilaksanakan dengan cara Swakelola Tipe II dengan Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT).

b. Sasaran :

27 OPD; 18 Kecamatan; 114 sekolah

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terinputnya data perencanaan :				
	- Usulan Desa/Kelurahan	dokumen	239	239	100
	- Usulan Kecamatan	dokumen	18	18	100
	- Usulan Forum OPD	dokumen	27	27	100
	- Usulan Renja	dokumen	45	45	100
	- Usulan RKPD / PPAS	dokumen	2	2	100

Terinputnya data perencanaan berupa Usulan Desa, Usulan Kecamatan, Usulan Forum OPD, Usulan Renja, dan Usulan RKPD / PPAS dimana realisasi pada tahun 2019 yaitu sudah terinput sebanyak 27 Usulan OPD Tingkat Kabupaten; 22 Usulan UPTD Kesehatan (Puskesmas); 60 Usulan UPTD Pendidikan (Puskesmas); 18 Usulan Kecamatan; 239 Usulan Desa/Kelurahan; dan 4 Usulan TK Pembina, sehingga capaian kinerja yaitu 100 %.

d. Permasalahan yang Dihadapi :

Pergantian personil di dalam OPD yang melakukan inputing data menyebabkan proses inputing data yang kurang lengkap, sehingga masih ada beberapa data perencanaan yang masih kosong dan

ditindaklanjuti oleh tim teknis di internal Bappelitbangda yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

e. Upaya Pemecahan Masalah :

Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi lebih lanjut apabila ada pergantian personil dalam melakukan proses inputing ke dalam Simral, bahkan lebih baik apabila masing-masing OPD yang sudah ada personil yang paham dengan Simral dapat memberikan transfer ilmu kepada personil yang baru. Kemudian perlunya koordinasi yang intensif baik dengan desa, kecamatan maupun OPD dalam proses inputing renja.

f. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp.736.191.000,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 680.928.256,- (92,49%)

8) Penyusunan KUA PPAS

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud penyusunan KUA PPAS adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan KUA PPAS antara lain :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- 2) Menjabarkan kebijakan umum anggaran daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara dalam penyusunan RAPBD;
- 3) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD.

b. Sasaran :

Aparatur pemerintah daerah/OPD

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rancangan Awal KUA	buku	25	25	100 %
2	Rancangan Awal PPAS	buku	25	25	100 %
3	Rancangan KUA	buku	80	80	100 %
4	Rancangan PPAS	buku	80	80	100 %
5	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang KUA	buku	80	80	100 %
6	Nota Kesepakatan	buku	80	80	100 %

	DPRD-Bupati tentang PPAS				
--	-----------------------------	--	--	--	--

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp. 110.336.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. 97.422.544,- atau 88,30 %

9) Penyusunan KUA PPAS Perubahan

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud penyusunan KUA PPAS Perubahan adalah mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan KUA PPAS Perubahan antara lain :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD Perubahan;
- 2) Menjabarkan kebijakan umum anggaran daerah dan menetapkan plafon anggaran sementara dalam penyusunan RAPBD Perubahan;
- 3) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan.

b. Sasaran :

Aparatur pemerintah daerah/OPD

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REAL-ISASI	CAPAI-AN
1	Rancangan Awal KUA Perubahan	buku	25	25	100 %
2	Rancangan Awal PPAS Perubahan	buku	25	25	100 %
3	Rancangan KUA Perubahan	buku	80	80	100 %
4	Rancangan PPAS Perubahan	buku	80	80	100 %
5	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang KUA Perubahan	buku	80	80	100 %
6	Nota Kesepakatan DPRD-Bupati tentang PPAS Perubahan	buku	80	80	100 %

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp. Rp. 114.100.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. 93.284.331,- atau 81,76 %

10) Penyusunan RKPD Perubahan

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud penyusunan Perubahan RKPD adalah guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD adalah:

- 1) Menjadi pedoman bagi OPD dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan KUPA serta PPAS Perubahan;
- 3) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah dan antarurusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

b. Sasaran :

Aparatur pemerintah daerah/OPD

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN
1	Rancangan RKPD Perubahan	Buku	80	80	100 %
2	Rancangan Akhir RKPD Perubahan	Buku	80	80	100 %
3	Perbup tentang RKPD Perubahan	Buku	80	80	100 %

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp 114.442.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. 97.942.759,- atau 85,58 %

11) Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

Pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

b. Sasaran :

Semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

c. Output /Keluaran:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pelatihan tematik	tema	3	3	100 persen

Adapun 3 (tiga) tema pembinaan perencanaan pembangunan terdiri dari :

- 1) Peningkatan Kapasitas Internal Penyusunan Cascading dan Pengelolaan SIMR@L tanggal 13 Agustus 2019.
- 2) Study Comparasi, Inovasi dan Out Door Team Building tanggal 5-7 September 2019 di Kota Batu, Malang.
- 3) Peningkatan Karakter untuk Perencana Internal Bappelitbangda tanggal 13-14 November 2019 di Yogyakarta .

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 132.640.000,00
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 120.708.000,00 atau 91,00 %

e. Permasalahan yang Dihadapi :

-

f. Upaya Pemecahan Masalah

-

12) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun PK

a. Maksud dan Tujuan :

- Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang PK yang mencakup 16 opd dan 67 program dalam RPJMD;
- Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Rumpun PK Tahun 2019 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
- Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di Rumpun PK dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;
- Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang Pemerintahan dan kesra yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir

b. Sasaran :

Program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang Pemerintahan dan kesra diantaranya sektor Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan, Litbang, Kearsipan dan Perpustakaan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, pengawasan, Kesatuan Bangsa dan Politik, ketertiban umum, serta pemerintahan umum.

c. Output / Keluaran :

Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemerintahan dan Kesra Tahun 2019 yang berisi gambaran hasil fasilitasi, diskusi dan desk pada saat penyusunan dokumen perencanaan (Renstra hasil cascading dan Renja OPD) pada rumpun bidang Pemkesra serta dokumentasi dan masukan hasil dari kunjungan ke lapangan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN
1	Renja OPD rumpun Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial	dokumen	34	34	100 persen
2	Kesesuaian Lapangan atas Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial	kali-dokumen	136	136	100 persen

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target anggaran : Rp. 134.160.000,-
- 2) Realisasi Keuangan : Rp. 126.327.004,- (94,16 %)

13) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Rumpun IPW

a. Maksud dan Tujuan :

- 1) Memfasilitasi dan pendampingan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang mencakup 6 urusan, 1 Layanan kebencanaan;
- 2) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan serta pengidentifikasian akan kemajuan kegiatan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Tahun 2019 meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi pelaksanaan kegiatan, tingkat efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), pencapaian keluaran dari kegiatan tersebut (output);
- 3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut yang meliputi terhadap hasil (outcome) dan sisi manfaat (benefit) dari pelaksanaan kegiatan tersebut;
- 4) Menilai aspek kesesuaian antara proses pelaksanaan dengan rencana kegiatan yang telah dilakukan;
- 5) Mendapatkan data-data dan fakta sebagai inform decision guna menetapkan tindak lanjut atau intervensi yang diperlukan oleh semua pelaku pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang berkepentingan untuk kemudian dibuatkan dalam laporan secara berkala terhadap hasil pelaksanaan monev tersebut serta menyusun laporan akhir.

b. Sasaran :

Program dan kegiatan dalam pembangunan di rumpun bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah diantaranya sektor pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, persandian dan layanan kebencanaan.

c. Output /Keluaran:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALI SASI	CAPAI AN
1	Renja OPD rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	dokumen	6	6	100 persen
2	Kesuaian Lapangan atas Laporan	kali- dokumen	24	24	100 persen

	Pengendalian/Evaluasi Renja Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
--	--	--	--	--	--

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target anggaran : Rp. 209.710.000,-

2) Realisasi Keuangan : Rp. 202.754.300,- (96,68 %)

2. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sasaran dari program ini adalah membaiknya Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD, Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD, Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matik dibawah ini :

Tabel 4,4

Capaian Kinerja

Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tahun 2019

No	Indikator Program	Target 2019	realisasi	Capaian
1	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	100 %	100 %	100 %
2	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 %	100 %	100 %
3	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	100 %	85%	85%

Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 8 kegiatan meliputi:

i. Penyusunan Analisis Standar Belanja

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud Penyusunan Analisis Standar Belanja :

- 1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksi
- 2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran

- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah
- 4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas
- 5) Dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan ASB adalah tersusunnya instrumen pendukung guna menilai kewajaran biaya dan beban kerja atas suatu kegiatan di setiap OPD

b. Sasaran :

Organisasi Perangkat Daerah

c. Output / Keluaran :

Dokumen Analisis Standar Belanja untuk Kabupaten Purbalingga yang berisi Analisis Standar Belanja sebanyak 11 kegiatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Dokumen Analisis Standar Belanja	dokumen	1	1	100%

d. Permasalahan yang Dihadapi :

- ASB 11 kegiatan belum memiliki Legalitas untuk Implementasinya sehingga belum dapat digunakan setelah perjanjian penyusunan ASB selesai;
- Dari Penyusunan ASB 11 kegiatan belum mengcover seluruh kegiatan di OPD;

e. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Segera menyusun legalitas implementasi ASB yaitu Peraturan Bupati pada Tahun 2020;
- 2) Akan melakukan perjanjian kembali untuk kegiatan-kegiatan OPD yang belum memiliki standar belanja;

f. Target dan Realisasi Keuangan :

- 1) Target Anggaran : Rp 183.200.000,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 154.512.092,- atau 84,34%

3) Sinkronisasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub

a. Maksud dan Tujuan

- 1) Kordinasi kegiatan TP, DAK dan Bangub dengan OPD penerima bantuan untuk lebih mudah dalam pelaksanaan ;
- 2) Sinkronisasi kegiatan yang diusulkan melalui TP, DAK dan Bangub bisa lebih optimal terencana sehingga mengurangi kegagalan dalam usulan dan pelaksanaan ;
- 3) Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada OPD dalam pengimputan usulan dan pelaksanaan

- 4) Bimbingan teknis dan pelayanan pengaduan terhadap aplikasi yang digunakan oleh anggaran tersebut diatas ;
- 5) Memberikan informasi setiap perkembangan kegiatan tersebut diatas ;

b. Sasaran :

OPD penerima dana DAK, BANGUB dan TP

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Usulan TP	dokumen	1	1	1
2	Usulan DAK	dokumen	1	1	1
3	Usulan Bangub	dokumen	1	1	1
4	Laporan Kinerja TP	dokumen	4	4	4
5	Laporan Kinerja DAK	dokumen	4	4	4
6	Laporan Kinerja Bangub	dokumen	4	4	4

d. Permasalahan yang Dihadapi :

Banyaknya SDM OPD penerima kegiatan tersebut diatas dikarenakan pergantian personil. Masih ada perbedaan informasi tentang DAK di kementerian masing – masing. Pelaporan kegiatan tersebut diatas masih lamban dan perlu percepatan dan kerjasama dengan OPD penerima kegiatan.

e. Upaya Pemecahan Masalah

Perlu koordinasi yang intensif dan Pengawasan yang intens selama penginputan, pelaksanaan dan pencairan sehingga permasalahan akan mudah di selesaikan dengan cepat dan tepat.

f. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 90.425.000,-
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 83.282.710,- atau 92,10% .

4) Penyusunan Analisis Makro Ekonomi Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

1. Menganalisis pencapaian Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga dari sisi pengeluaran dan sisi sektoral untuk mengetahui capaian perekonomian daerah Kabupaten Purbalingga.
2. Menganalisis pencapaian PDRB Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun terakhir untuk mengetahui capaian pertumbuhan ekonomi daerah pertahun serta pertumbuhan proporsi setiap sektor terhadap total PDRB
3. Menganalisis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulan untuk mengetahui perkembangan inflasi.

b. Sasaran :

Pemerintah Daerah, berbagai komponen masyarakat dan stakeholders terkait.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laporan Analisa Ekonomi Makro Kabupaten Purbalingga	buku	30	30	100%

d. Permasalahan yang Dihadapi :

Masih terbatasnya sumber data dan kemampuan SDM dalam mengelola data.

e. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Melaksanakan kolaborasi/kerjasama dengan BPS selaku narasumber penyediaan data statistik.
- 2) Mengupayakan data yang disampaikan merupakan data terbaru sehingga dapat digunakan untuk penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah.

f. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp. 73.540.000,-
- 2) Realisasi Anggaran: Rp. 37.024.250,- atau 50,35 %

5) Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) (Bangub)

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga adalah melaksanakan pemanfaatan dana belanja bantuan keuangan kabupaten/kota sehingga terciptanya sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota

b. Sasaran :

- 1) Stakeholder terkait .

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laporan Pelaksanaan SPPD Bangub	buku	5	5	100 persen

d. Permasalahan yang Dihadapi :

- 1) Pengisian matrik pada SIPD dan SDGs belum maksimal.

- e. Upaya Pemecahan Masalah
 - 1) Koordinasi dan pendampingan secara intensif terhadap OPD dalam pengisian matrik.
- f. Target dan Realisasi Keuangan
 - 1) Target anggaran : Rp. 533.736.000,-
 - 2) Realisasi Keuangan : Rp. 277.183.542,- (51,93 %)

6) Evaluasi RKPD

- a. Maksud dan Tujuan :
pelaksanaan program dan kegiatan Evaluasi RKPD yaitu tersedianya dokumen Pengendalian dan Evaluasi, dimana dokumen tersebut berupa Laporan Evaluasi RKPD Semester 1 dan Laporan Evaluasi RKPD Semester 2 yang masing-masing memuat Evaluasi Kinerja Program RKPD Kabupaten Purbalingga Semester 2 Tahun 2019 terhadap Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga Semester I Tahun 2019 (Kinerja OPD).
- b. Sasaran :
Semua SKPD / OPD lingkup pemerintah Kabupaten Purbalingga
- c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RKPD yang ditindaklanjuti	buku	10	9	90%

- d. Permasalahan yang Dihadapi :
Tidak lengkapnya data yang dibutuhkan khususnya mengenai capaian kinerja program RKPD terhadap target RPJMD yang dimiliki oleh masing-masing OPD, sehingga keterisian data kurang sempurna
- e. Upaya Pemecahan Masalah
Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan desk bersama OPD untuk menginventarisir data-data mana saja yang belum dapat terisi untuk dilakukan pendekatan dalam perolehan datanya, sehingga capaian kinerja program OPD dapat diketahui.
- f. Target dan Realisasi Keuangan
 - 1) Target Anggaran : Rp. 82.055.000,-
 - 2) Realisasi Anggaran : Rp. 71.228.058,- (86,81 %)

7) Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia

- a. Maksud dan Tujuan :
 - 1) Tersajinya data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.

- 2) Data dimaksud diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya manusia di Kabupaten Purbalingga, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.
 - 3) Mendapatkan gambaran tentang kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan manusia di Kab. Purbalingga.
 - 4) Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga.
 - 5) Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator - indikator sosial lainnya di Kabupaten Purbalingga.
 - 6) Terumuskannya strategi untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.
- b. Sasaran :
- 1) OPD yang mengampu program dan kegiatan yang mendukung peningkatan IPM.
 - 2) Instansi yang merilis data IPM (BPS).
- c. Output /Keluaran:

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi Strategi Pembangunan Manusia	buku	20	20	100 persen

Anggaran kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia digunakan untuk Koordinasi, Rapat Pembahasan, Honor narasumber dan pencetakan 20 eksemplar buku. Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan BPS Kabupaten Purbalingga sebagai narasumber penyusunan buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia Kab. Purbalingga Tahun 2019.

- d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

- e. Upaya Pemecahan Masalah

-

- f. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target anggaran : Rp 76.045.000,-
- 2) Realisasi Keuangan : Rp 66.285.500,- atau (87,17 %)

8) Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra

- a. Maksud dan Tujuan :

- 1) Maksud dari kegiatan ini adalah mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga.

- 2) Tujuan dari kegiatan ini adalah memberi gambaran pencapaian status sosial ekonomi masyarakat melalui berbagai indikator kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi dan perumahan.

b. Sasaran :

sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah penyediaan data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah dimasa mendatang.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Posisioning Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2018	buku	30	30	100%

d. Permasalahan yang Dihadapi :

-

e. Upaya Pemecahan Masalah

-

f. Target dan Realisasi Keuangan

a) Target Anggaran : Rp 83.787.000,00

b) Realisasi Anggaran : Rp 78.983.374,00 atau 94,27%

9) Analisis Survey Nilai Tukar Petani (NTP)

a. Maksud dan Tujuan :

- 1) Memberikan gambaran tentang indeks harga yang diterima petani sebagai penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian;
- 2) Memberikan gambaran tentang sector konsumsi rumah tangga dalam indeks harga yang dibayar petani;
- 3) Memberikan gambaran tentang nilai tukar petani guna mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengna produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi sebagai salah satu indicator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

b. Sasaran :

- 1) Para petani di Kabupaten Purbalingga meliputi sub sector Padi, Palawija, Hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan budidaya.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Buku Analisis Survey Nilai Tukar Petani	buku	3	3	100 persen

d. Permasalahan yang Dihadapi

- e. Upaya Pemecahan Masalah
 -
- f. Target dan Realisasi Keuangan
 - 1) Target anggaran : Rp. 97.391.000,-
 - 2) Realisasi Keuangan : Rp. 80.436.832,- (82,59 %)

3. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

Sasaran dari program ini adalah membaiknya Persentase Temuan Lembaga Pengawasn yg ditindaklanjuti, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Rata-rata Capaian SKP. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matik dibawah ini :

Tabel 4,4
Capaian Kinerja
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Tahun 2019

No	Indikator Program	Target 2019	realisasi	Capaian
1	Persentase Temuan Lembaga Pengawasan yg ditindaklanjuti	100	100	100 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	83,57	98,32 %
3	Rata-rata Capaian SKP	88	84,71	96,26 %

1. Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti.

Tahun 2019 Tim APIP Inspektorat Kabupaten tidak melaksanakan audit operasional tetapi melaksanakan reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 pada tanggal 25 Juni 2019. Reviu dokumen Perubahan RKPD berdasarkan atas Surat Plt. Kepala Bappelitbangda tentang tahapan Penyampaian Dokumen Perubahan RKPD ke Propinsi harus sudah ada reviu dari Inspektorat. Rekomendasi atas reviu yang perlu menjadi perhatian terhadap dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan dokumen sampai dengan ditetapkan. Reviu dokumen RKPD Perubahan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses penetapan dokumen RKPD Perubahan oleh Propinsi.

Selengkapnya capaian kinerja terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Temuan Lembaga Pengawasan yg ditindaklanjuti	persen	100	100	100%

2. Rata-rata Capaian SKP

Sasaran kinerja pegawai Bappelitbangda sejumlah 31 pegawai negeri sipil, terdiri 20 pejabat struktural dan 11 pelaksana. Rata-rata capaian SKP seluruh PNS dibappelitbangda sebesar 84,71 gambaran umum penilaian SKP berdasarkan tingkat eselon sebagai berikut :

- a. Capaian SKP Eselon II adalah 95.
- b. Capaian SKP Eselon III adalah 89.
- c. Capaian SKP Eselon IV adalah 85,71.
- d. Capaian SKP Pelaksana adalah 80,54.

Selengkapnya capaian kinerja dari indikator Rata-rata Capaian SKP terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

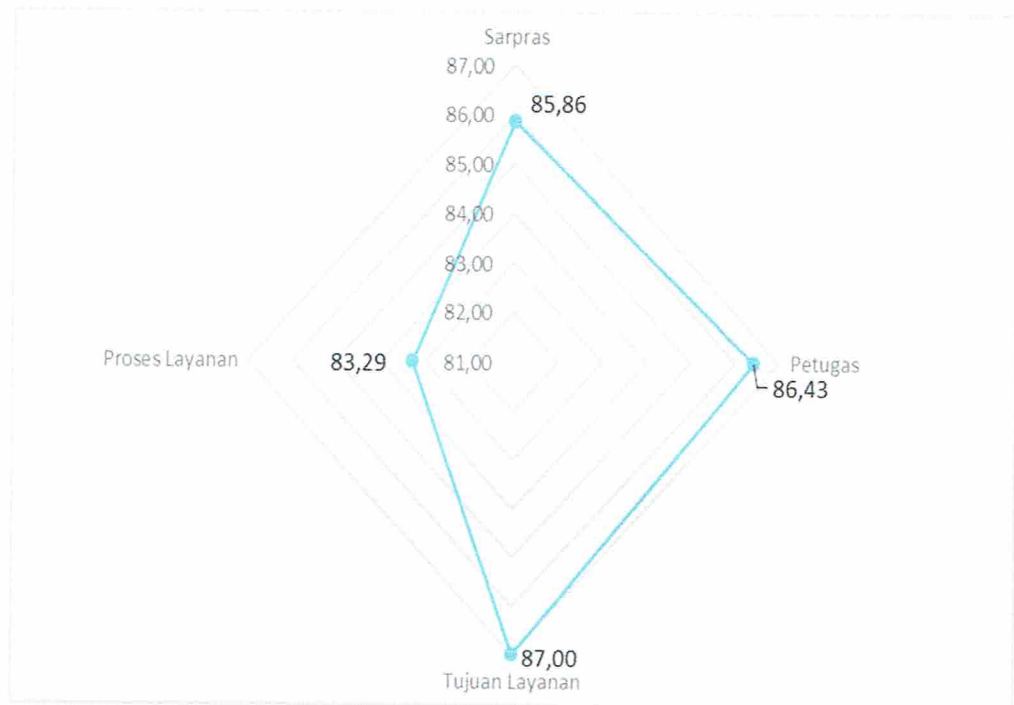
INDIKATOR KIENRJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rata-rata Capaian SKP	angka	87	84,71	97,37 persen

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan Publik kepada masyarakat, maka Bappelitbangda telah melaksanakan pengukuran “Kepuasan Masyarakat”. Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mendapatkan feed back/ umpan balik atas kinerja/ kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/ peningkatan kinerja/ kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Program ini diselenggarakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik (good governance).

Survey IKM pada Bappelitbangda dilakukan secara mandiri pada bulan Januari s/d Maret 2019 dengan mengambil sampel sejumlah 91 responden. Kuesioner survey IKM menggunakan daftar pertanyaan dengan 5 variabel yakni ketersediaan sarpras, sikap petugas, proses pelayanan dan pungutan oleh petugas dengan menggunakan skala penilaian sebanyak 5 tingkat. Hasil survey menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi pada variabel Tujuan pelayanan, berturut turut diikuti petugas pelayanan, sarpras pelayanan dan proses layanan. Kesimpulan yang didapat dari hasil survey IKM bahwa prosedur pelayanan masyarakat sudah baik dan agar dapat dipertahankan.

**Grafik Hasil Survey IKM Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2019**



Selengkapnya capaian kinerja dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat pada ringkasan tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	85	85,17	100,2 %

Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah terdiri dari 7 kegiatan meliputi:

1) Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga

b. Sasaran :

Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Tersedianya daya listrik	Kwh	182.400	45.964	25,20
2	Tersedianya Air PAM	M3	1.000	866	86,6
3	Tersedianya jasa telpon	sambungan	3	3	100
4	Tersedianya bahan kantor	bulan	12	12	100

Pada tahun 2019 penyediaan daya listrik di Bappelitbangda terjadi efisiensi yang cukup tinggi sebesar 74,8 persen dari target ketersediaan listrik. Hal tersebut dipengaruhi atas aturan Bupati tentang perintah 5 (lima) hari kerja. Sedangkan untuk air minum terjadi efisiensi sebesar 13,4 persen. Dan secara umum kinerja dari kegiatan ini telah tercapai.

d. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp. 495.421.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. 446.505.886,- atau 90,13%

e. Permasalahan yang Dihadapi

-

f. Upaya Pemecahan Masalah

-

2) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah

b. Sasaran :

Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mengadakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terlaksananya kunjungan lapangan/survey	orang/hari	324	124	38,27%
2	Terlaksananya koordinasi/kunjungan/undangan tingkat regional	orang/hari	41	72	175,61%

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jateng/DIY	orang/hari	175	109	62,28%
4	Terlaksananya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jakarta dan Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY	orang/hari	59	42	71,19%
5	Terlaksananya Undangan di luar Jawa	orang/hari	14	4	28,57%
Rata-rata tingkat capaian total					75,18 %

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 299.460.000,00 dan
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 292.003.215,00 atau 97,51 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

Banyaknya undangan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia

f. Upaya Pemecahan Masalah

Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan melakukan pemilahan undangan yang harus dihadiri dan tidak dihadiri berdasarkan tingkat urgensitasnya.

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan

b. Sasaran :

Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasarana kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan

c. Output /Keluaran:

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari selama 12 bulan atas Roda dua roda 4, Komputer pc, laptop, printer, genset, AC, serta Rehab kamar mandi dan pemasangan atap tempat wudu.

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 322.698.000,00
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 284.160.202,00 atau 88,06 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

-

f. Upaya Pemecahan Masalah

-

4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat

b. Sasaran :

Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah

c. Output / Keluaran :

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan maupun spesifikasinya, adapun aset yang dipelihara pada Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- 1) Lemari Arsip (4 unit)
- 2) Vacum Cleaner (2 unit)
- 3) TV sekualitas Panasonic TH 49f305G (2 set)
- 4) Lampu LED 100m (1 set)
- 5) Laptop sekualitas HP Pav 14-ce2047tx (1 unit)
- 6) Tangga Teleskopik
- 7) Sound System (1 unit)
- 8) Gordyn Jendela (1 paket)
- 9) AC 1 PK (2 unit)

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 102.825.000,00
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 81.925.000,00 atau 79,67 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

-

f. Upaya Pemecahan Masalah

-

5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dengan mengirimkan ASN Bappelitbangda ke lembaga yang memiliki kompetensi dalam memberikan pelatihan teknis.

b. Sasaran :

Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terkirimnya SDM dalam pelatihan teknis	orang hari	25	47	188%

Adapun tema pelatihan perorangan yang dikirim meliputi beberapa tema yakni

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi SIMBANGDA BANKEU TAHUN 2019
2. Study Banding terkait dengan SAKIP
3. Ujian UKPPI Tingkat III Tahun 2019
4. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019
5. Pelatihan Teknis Capacity Building Provinsi Jawa Tengah
6. Pelatihan Teknis Manajemen Pengembangan Investasi Daerah

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target Anggaran : Rp 20.000.000,00
- 2) Realisasi Anggaran : Rp. 13.755.338 atau 68,78 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan.

f. Upaya Pemecahan Masalah

Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Provinsi diharapkan lebih awal memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan

6) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan

b. Sasaran :

Sasaran dari kegiatan ini adalah agar program dan kegiatan Bappelitbangda dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rencana Kerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	100 %
2	LKPJ	dokumen	1	1	100 %

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	LKJIP	dokumen	1	1	100 %
4	LK	dokumen	1	1	100 %
5	Laporan Pengendalian/Evaluasi Renja	dokumen	4	4	100 %
6	Laporan bulanan realisasi kinerja	dokumen	12	12	100 %

d. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp 40.000.000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp. 34.995.250,00 atau 87,49 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian kegiatan ini adalah pada saat penyusunan LKPJ dan LKJIP untuk pemenuhan data realisasi kinerja tergantung pada penyelesaian dari seluruh OPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJIP sering terlambat,

f. Upaya Pemecahan Masalah

Upaya Pemecahan Masalah yang dilakukan adalah dengan koordinasi secara terus menerus dengan seluruh OPD

7) Penataan Arsip

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud dari kegiatan ini adalah memfasilitasi penataan arsip keuangan dan penting agar terpelihara

b. Sasaran :

Sasaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Bappelitbangda

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Dokumen arsip	box	40 box	197 box 3391 berkas	492,5 %

d. Target dan Realisasi Keuangan

1) Target Anggaran : Rp 20.000.000,00

2) Realisasi Anggaran : Rp. 19.998.000,00 atau 99,99 %.

e. Permasalahan yang Dihadapi

-

f. Upaya Pemecahan Masalah

-

2. Program dan Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tujuan Penelitian dan pengembangan daerah adalah Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Tabel 4.4

Capaian Sasaran Kinerja Urusan Litbang

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	55 persen	0 persen	0%

Pada tahun 2019 realisasi capaian kinerja Urusan Litbang 0 persen. Untuk mencapai sasaran kinerja Bappelitbangda telah melaksanakan program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan 2 kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Fasilitasi KKN, dan Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sasaran dari program ini adalah Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah dan Jumlah kerjasama kelitbangan. Adapun capaian kinerja program tersebut tergambar pada matrik dibawah ini :

Tabel 4.3

Capaian Kinerja

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tahun 2019

No	Indikator Program	Target 2019	realisasi	Capaian
1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100 persen	100 persen	100 persen
2	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah	100 persen	0 persen	0 persen
3	Jumlah kerjasama kelitbangan	7	15	214,3%

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri dari 3 kegiatan meliputi:

1) Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Maksud dan Tujuan :

Meningkatkan kegiatan litbang dalam rangka tersedianya informasi kepada dinas/instansi maupun masyarakat mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan.

b. Sasaran :

Instansi/OPD yang terkait dan semua masyarakat, pelajar, mahasiswa yang mempunyai gagasan atau penemu yang dapat di kembangkan.

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah peserta lomba	inventor	20	20	100%
2	Pengantar penelitian	berkas	550	550	100%
3	Rekomendasi Kajian Potensi/Permasalahan Daerah	rekomen da si	1	1	100%

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan ijin penelitian, rekomendasi hasil kajian dan Lomba Krenova dengan sasaran sejumlah 20 inventor, 550 ijin penelitian dan 1 rekomendasi, dengan jumlah 1 kali pertemuan lomba krenova yang bertujuan untuk meningkatkan perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah serta merekomendasikan yang harus dilaksanakan sehingga tidak terjadi penurunan peserta Lomba Krenova di setiap tahunnya dengan sasaran anak sekolah SMK/SMA dan Masyarakat.

d. Target dan Realisasi Keuangan :

1) Target Anggaran : Rp. 132.075.000,-

2) Realisasi Anggaran : Rp. 125.185.960,- atau 94,78%.

e. Permasalahan yang Dihadapi :

Belum adanya jaringan kelitbangan, Dewan Riset Daerah (DRD) atau pendampingan dari perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Purbalingga.

f. Upaya Pemecahan Masalah :

Diharapkan untuk tahun yang akan datang sudah ada pendampingan dari perguruan tinggi dan Dewan Riset Daerah dan juga diharapkan sudah mempunyai jaringan-jaringan yang terkait dengan Kelitbangan agar dapat mengembangkan pembangunan yang ada di Kab. Purbalingga.

2) Fasilitas KKN

a. Maksud dan Tujuan :

- Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi implementasi Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga
- Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purbalingga
- Memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di wilayah Kabupaten Purbalingga
- Salah satu faktor fundamental dalam pengentasan kemiskinan adalah mengubah perilaku dari masyarakat utamanya di desa, dimana kegiatan mengubah perilaku ini perlu dibudayakan dan tidak langsung terlihat dalam output atau outcome sebuah kegiatan / program. Penguatan kelembagaan desa, dawis, posyandu, posdaya, kader kesehatan desa, relawan sosial desa, PPKBD, sub PPKBD/ PKBRT, berbagai macam pelatihan dan penyuluhan bidang pendidikan, kesehatan, hukum, kependudukan/KB, ekonomi, dan berbagai pelatihan lainnya merupakan contoh program kerja mahasiswa KKN yang meskipun tidak kelihatan, dalam jangka panjang sangat berguna bagi peningkatan kesadaran, perilaku positif dan merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
- Mahasiswa KKN merupakan potensi sumber daya yang sangat strategis. Apabila program dan kegiatan mahasiswa KKN diampu oleh OPD dan dianggarkan melalui APBD, akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemitraan yang baik antara pemda dan unsur perguruan tinggi merupakan hal positif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Mengoptimalkan mahasiswa KKN untuk membantu kebutuhan OPD antara lain:
 - Ikut mendistribusikan dokumen kependudukan dari Dinpendukcapil
 - Mengisi form kuesioner dan *interview guide* bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan tematik lain sesuai kebutuhan.
 - Membantu melakukan monitoring dan dokumentasi pada program / kegiatan pembangunan baik yang bersumber APBN, APBD Provinsi / Ban Gub, maupun APBD Kabupaten yang berlokasi di desa KKN.

b. Sasaran :

- 1) Mahasiswa dari perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Purbalingga
- 2) OPD yang mempunyai program dan kegiatan yang dapat disinergikan dengan program dan kegiatan mahasiswa Kuliah kerja Nyata.
- 3) Para camat, kepala desa, dan masyarakat desa/ kelurahan yang menjadi tuan rumah kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

c. Output / Keluaran :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi	perguruan tinggi	6	15	250 %
2	Fasilitasi Mahasiswa KKN	mahasiswa	1750	2193	120,46 %

d. Target dan Realisasi Keuangan

- 1) Target anggaran : Rp 158.540.000,-
- 2) Realisasi Keuangan : Rp 146.929.761,- atau (92,05 %)

e. Permasalahan yang Dihadapi :

- 1) Pada beberapa desa sudah mulai ada kejenuhan penempatan lokasi sehingga merasa tidak memerlukan Kegiatan KKN lagi di desanya;

f. Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Melakukan pemetaan untuk desa-desa yang sudah sering mendapatkan lokasi KKN.

3) Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian

a. Maksud dan Tujuan :

Maksud kegiatan peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian adalah tersedianya pembimbing/inovator yang metodologis

b. Sasaran :

Para pembina/penyusun karya ilmiah

c. Output / Keluaran :

Realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan Workshop yang diikuti oleh semua SMA/SMK dan masyarakat sebagai inventor sasaran sejumlah 100 orang dengan jumlah 2 kali pertemuan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat anak-anak sekolah dan masyarakat dalam mengikuti workshop/pembimbing/Inventor yang metodologis sehingga tidak terjadi penurunan minat penemu/ perekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah serta merekomendasikan yang harus dilaksanakan sehingga tidak terjadi penurunan penemu atau perekayasa di setiap tahunnya dengan sasaran anak sekolah SMK/SMA dan Masyarakat penemu.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembimbing/Inovator	orang	100	100	100%

d. Target dan Realisasi Keuangan :

- 1) Target anggaran : Rp 59.800.000,-
- 2) Realisasi Keuangan : Rp 51.659.337,- (86,39 %)

e. Permasalahan yang Dihadapi :

-

f. Upaya Pemecahan Masalah :

-

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Renja SKPD

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan implementasi visi Pemerintah Daerah. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah

1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan dari CC ke B
2. Mewujudkan Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang berkualitas yang ditandai dengan Inventor purbalingga masuk dalam nominator Krenova tingkat Provinsi.

3.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2021, meliputi :

Sasaran pertama dalam rangka mewujudkan tujuan pertama adalah Meningkatnya kualitas perencanaan dengan indikator kinerjanya adalah Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah dan Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2019)	Target 2021
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	persen	98,27	97,7
	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	persen	91,3	100

Sasaran kedua dalam rangka mewujudkan tujuan kedua adalah Meningkatkan kualitas kelitbangan, dengan indikator kinerja Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2019)	Target 2021
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	50	65

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2021 terlihat pada tabel dibawah ini.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Usutan/ Bidang Usutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prkiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembanguna n Nasional			
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur		Tolok Ukur							
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5														
5 01									6,587,273,000					
5 01 01									4,738,339,500	4,691,713,000				
5 01 01 2.01									22,500,000	22,500,500				
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100 persen	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100 persen	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKJP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SPIP) yang tersusun	6 dokumen	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,256,288,000	4,256,288,000				
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	31 ASN	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	12 bulan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/ undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam) Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	195 orang/kali 418 orang/kali	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	12 bulan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	12 orang/bulan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	12 bulan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bulan	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	12 bulan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik			
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								25,000,000	30,000,000				

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional					
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan									
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata rata capaian SKP	>90 angka	Terkirimnya peserta diklat	25 orang/kali	Prosentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin dan Prosentase ASN yang meningkat skill dan pengetahuannya	100 persen	25,000,000	30,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								168,314,500	168,314,500			
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya perlengkapan listrik	10 jenis unit/buah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	2,865,000	2,865,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya peralatan rumah tangga	3 jenis unit/buah	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	3,000,000	3,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	102,912,000	102,912,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	46000 lembar	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	14,158,500	14,158,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	360 eksemplar/bulan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	2,340,000	2,340,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya Alat Tulis Kantor	30 jenis	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	12 bulan	20,666,500	20,666,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga

Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	800 orang/kali	22,372,500	22,372,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis unit/buah	26,356,000	26,356,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya perangkat, material, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan	1,625,000	2,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bulan	75,600,000	75,600,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	6,400,000	7,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Tersedianya Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 orang/bulan	50,400,000	50,400,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll) Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	36 unit 36 unit	82,602,000	30,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.00.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Terpeliharanya Peralatan Kerja	6 jenis	100 persen	11,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)	1 unit	100 persen	12,254,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan												
5 01 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah Desa yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD Jumlah Forum OPD yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD Jumlah Kecamatan yang mengusulkan kegiatan dalam RKPD	239 desa 27 OPD 16 kecamatan	100 persen	148,320,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti	5 kegiatan	100 persen	350,910,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Purbalingga, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun	3 dokumen	100 persen	548,160,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah dokumen terkait dengan informasi pembangunan	3 dokumen	100 persen	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah												
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah dokumen usulan dan pelaporan kinerja TP, DAK, dan Bangub	5 dokumen	100 persen	80,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode			Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional		
							Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan	
							Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				Tolok Ukur	Target
5	01	02	2.03	03	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100 persen	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan dan kinerja pembangunan tahunan	4 dokumen	Cakupan program RPJMD yang tercapai kinerja sasarnya	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									588,842,000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									128,078,000	
5	01	03	2.01	01	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	28 dokumen	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03	2.01	05	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen usulan daerah bidang kesejahteraan masyarakat Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan manusia	2 dokumen 3 OPD	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									139,942,000	
5	01	03	2.02	01	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen bidang ekonomi kreatif tersusun Jumlah dokumen perekonomian tersusun	1 dokumen 1 dokumen	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang perekonomian dan SDA	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03	2.02	05	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen sda tersusun	1 dokumen	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang perekonomian dan SDA	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									320,822,000	
5	01	03	2.03	01	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur tersusun	3 dokumen	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	01	03	2.03	05	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	100 persen	Jumlah dokumen keciptakarya tersusun	1 dokumen	sikronisasi dokumen perencanaan pembangunan dan laporan pengendalian/evaluasi renja bidang infrastruktur dan kewilayahan	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	
						Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan							
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH											
5	05	02	2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan											
5	05	02	2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga Iptek	7 lembaga	Jumlah perguruan tinggi dan mahasiswa yang terfasilitasi dalam kegiatan KKN	1750 mahasiswa	Cakupan rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	100 persen	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	05	02	2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											
5	05	02	2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi diseminasi hasil litbang	4 desiminasi	Jumlah pelaksanaan lomba krenova	1 kegiatan	Jumlah rekomendasi penerapan litbang	1 rekomendasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
5	05	02	2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran Misi 1 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Kab. Purbalingga, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Frekuensi diseminasi hasil litbang	4 desiminasi	Jumlah sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan	1 workshop/pameran	Jumlah rekomendasi penerapan litbang	1 rekomendasi	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
TOTAL													6,891,475,500	6,786,773,000	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan dimana dalam perencanaan dan penyusunannya memerlukan pengamatan yang tepat dan akurat, serta penilaian dan antisipasi yang efektif. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh kapabilitas dan integritas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus di dukung oleh prasarana dan sarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi dan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya segenap pegawai/personil yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, karena Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga akan dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh semangat, dedikasi, integritas dan upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sebagai tahapan pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga



SISWANTO, S.Pt, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197205271998031005